PERAN KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN ANAK-ANAK DI SD MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA

Waliyul Maulana Siregar¹, Marwah Afifah Tanjung², Talitha Ifthina Ariqa³,
Sry Hafiza Hasibuan⁴, Michael Angelo Sitanggang⁵, Alya Nabila Dalimunthe⁶
Universitas Negeri Medan

E-mail: waliyulms@unimed.ac.id¹, marwahafifahtjg@gmail.com²,
talithaifthinaariqa@gmail.com³, sryhafizahsbfiza@gmail.com⁴,
sitanggangmichael8@gmail.com⁵, 27alyanabila@gmail.com⁶

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-01-25
Review : 2024-02-28
Accepted : 2024-03-15
Published : 2024-03-31

KATA KUNCI

Kurikulum Merdeka, Pendidikan Pancasila, Kepemimpinan Anak-Anak, Sekolah Dasar, Tantangan Implementasi.

Curriculum Merdeka, Pancasila Education, Children's Leadership, Elementary School, Implementation Challenges.

A B S T R A K

Kurikulum Merdeka di Indonesia telah menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD). Penelitian ini secara kritis mengevaluasi peran Kurikulum Merdeka dalam membentuk kepemimpinan anak-anak di SD melalui pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila. Metode penelitian yang tepat adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dari beberapa SD yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Studi pustaka menjadi penting karena memberikan gambaran luas tentang bagaimana konsep Pendidikan Pancasila tercermin dan diimplementasikan dalam konteks nyata. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan landasan yang kuat untuk pembentukan kepemimpinan anak-anak dengan menekankan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, namun tantangan yang signifikan masih menghambat implementasinya. Kurangnya pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka dan keterbatasan sumber daya menjadi beberapa masalah utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dalam pelatihan guru dan perbaikan infrastruktur pendidikan untuk mendukung penerapan Kurikulum Merdeka secara efektif. Implikasi temuan ini menekankan perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mendukung upaya pembentukan kepemimpinan anak-anak di SD melalui Kurikulum Merdeka, serta menanggulangi tantangan yang dihadapi.

ABSTRACT

The Merdeka curriculum in Indonesia has been in the spotlight in an effort to improve the quality of education, especially at the elementary school (SD) level. This study critically evaluates the role of the Independent Curriculum in shaping the leadership of children in elementary schools through the Pancasila Education learning approach. The right research method is a qualitative descriptive approach using literature studies from several elementary schools that apply the Independent Curriculum. Literature study is important because it provides a broad overview of how the concept of Pancasila Education is reflected and implemented in a real context. The results of the analysis show that, although the Merdeka Curriculum offers a strong foundation for children's leadership formation by emphasizing the integration of Pancasila values in learning, significant challenges still hinder its implementation. Teachers' lack of understanding of the concept of Curriculum Merdeka and limited resources are some of the main problems. Therefore, more comprehensive efforts are needed in teacher training and improvement of educational infrastructure to support the effective implementation of the Independent Curriculum. The implications of these findings emphasize the need for strong commitment from the government, educational institutions, and communities to support efforts to build leadership for children in elementary schools through the Independent Curriculum, as well as overcome the challenges faced.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan telah menjadi fokus utama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu inisiatif terbaru yang menarik perhatian adalah implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan upaya reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan memperkuat nilai-nilai nasional. Seiring dengan itu, pembelajaran Pendidikan Pancasila diidentifikasi sebagai salah satu aspek penting dalam membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda Indonesia.

Subekti, dkk. (2020), menyoroti bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berpotensi meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa, namun membutuhkan dukungan yang kuat dari guru dan stakeholder pendidikan lainnya. Selain itu, penelitian

oleh Suyanto (2019) menekankan perlunya pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan nilai-nilai lokal dalam membentuk karakter dan kepemimpinan siswa.

Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepemimpinan yang berkarakter dan berintegritas di kalangan anak-anak. Sebagai mata pelajaran inti dalam kurikulum pendidikan Indonesia, Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga untuk membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan persatuan sehingga integrasi nilai-nilai Pancasila dalam Kurikulum Merdeka diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam membentuk kepemimpinan anak-anak di Sekolah Dasar (SD).

Meskipun demikian, upaya untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan tersebut mencakup pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, ketersediaan sumber daya, dan dukungan masyarakat dalam mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang kritis terhadap peran Kurikulum Merdeka dalam membentuk kepemimpinan anak-anak di SD melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, dalam hal ini adalah peran Kurikulum Merdeka dalam membentuk kepemimpinan anak-anak di Sekolah Dasar (SD) melalui pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Studi pustaka dipilih sebagai metode pengumpulan data karena memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, dokumen resmi, dan laporan penelitian terkait. Dalam hal ini, peneliti akan mencari dan mengevaluasi literatur yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka dan pembelajaran Pendidikan Pancasila di SD.

Proses penelitian akan dimulai dengan identifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal akademik, buku teks, dan laporan penelitian terkait. Setelah itu, peneliti akan melakukan pembacaan dan analisis mendalam terhadap literatur yang telah terpilih. Data yang diperoleh dari studi pustaka akan dianalisis dengan fokus pada temuan-temuan utama yang berkaitan dengan peran Kurikulum Merdeka dalam pembentukan kepemimpinan anak-anak di SD melalui pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila. Selain itu, dalam menginterpretasi temuan, peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang relevan, seperti teori kepemimpinan dan konsep pembelajaran kontekstual, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Kurikulum Merdeka dan pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat mempengaruhi pembentukan kepemimpinan anak-anak di SD.

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan secara lebih rinci meliputi identifikasi literatur yang relevan, pembacaan dan analisis mendalam terhadap literatur, pengumpulan data dari studi pustaka yang telah terpilih, analisis data dengan fokus pada temuan-temuan utama, dan interpretasi temuan dengan menggunakan kerangka konseptual yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada siswa dalam mengatur proses pembelajarannya sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan mereka. Konsep ini didasarkan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Salah satu penggagas utama dari gagasan ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nadiem Makarim. Konsep Kurikulum Merdeka Belajar, yang diprakarsai oleh Mendikbud Nadiem Makarim, mencerminkan sebuah revolusi dalam paradigma pendidikan Indonesia. Dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, Nadiem memperkenalkan gagasan ini sebagai solusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan saat itu. Dalam era kepemimpinan Nadiem Makarim, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Dia memandang pentingnya membebaskan siswa dari batasan tradisional pembelajaran dengan memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada mereka dalam mengatur proses pembelajaran. Kualitas guru tetap dianggap sebagai faktor kunci dalam pendidikan, namun Nadiem juga mendorong penggunaan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas guru dalam mendidik siswa.

Kurikulum Merdeka Belajar memprioritaskan pengembangan kualitas guru sebagai strategi utama. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menginspirasi dan membimbing siswa secara optimal. Teknologi dipandang sebagai alat bantu bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sebagai pengganti peran guru itu sendiri. Konsep merdeka belajar juga menekankan pentingnya keberagaman sebagai esensi pembelajaran. Dalam konteks ini, keberagaman minat dan kemampuan siswa diakui dan dihargai. Pendekatan evaluasi yang lebih holistik diadopsi, di mana pencapaian siswa dinilai tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas ekstrakurikuler dan non-akademik lainnya.

Kurikulum Merdeka Belajar juga menekankan pembentukan profil pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai profil pelajar Pancasila, yang meliputi kemampuan bernalar kritis, kemandirian, kreativitas, kesadaran akan keberagaman global, berakhlak mulia, dan keterlibatan dalam pembelajaran berbasis proyek. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, siswa tidak hanya diajarkan materi pelajaran, tetapi juga dilatih untuk mengembangkan keterampilan sosial, kolaboratif, dan kreatif.

Melalui Kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan terwujud generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi, yang siap menghadapi tantangan global di masa depan. Konsep ini memberdayakan setiap individu untuk berkembang secara penuh sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, sehingga akan berdampak pada kemajuan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Dalam analisis terhadap buku "Transformasi Kurikulum: Menuju Pendidikan yang Relevan dan Bermakna" karya Smith (2021), ditemukan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan yang lebih besar bagi sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini berarti, sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks dan kebutuhan siswa di daerah mereka. Salah satu aspek penting yang dapat diintegrasikan adalah nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sebuah SD di daerah pedesaan mungkin ingin menekankan nilai-nilai gotong royong atau gotong-royong dalam kurikulum mereka, sementara SD di daerah

perkotaan mungkin lebih fokus pada nilai-nilai pluralisme dan toleransi.

Dukungan terhadap temuan ini juga ditemukan dalam jurnal "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembentukan Karakter Siswa di SD Negeri 01" oleh Adi, et al. (2020). Dalam jurnal ini, peneliti menyoroti bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam Kurikulum Merdeka menjadi aspek krusial dalam pembentukan karakter siswa, termasuk pembentukan kepemimpinan. Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila, siswa diberi kesempatan untuk memahami nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, siswa dapat mengorganisir kegiatan gotong royong di lingkungan mereka, menunjukkan inisiatif kepemimpinan mereka.

Fleksibilitas yang diberikan sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih kontekstual dalam pembelajaran. Ini menciptakan landasan yang kuat bagi pembentukan kepemimpinan anak-anak melalui pendekatan Pendidikan Pancasila. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum memberikan siswa pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, kendala yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan pembelajaran Pendidikan Pancasila juga perlu diperhatikan. Dalam buku yang sama, Smith (2021) menyoroti bahwa kurangnya pemahaman dan kesiapan guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka dapat menjadi hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran. Hal serupa juga disampaikan oleh Adi, et al. (2020), yang menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat mempengaruhi efektivitas pembentukan karakter siswa, termasuk kepemimpinan. Ketika guru tidak memiliki pemahaman yang cukup atau tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, mereka mungkin kesulitan mengembangkan potensi kepemimpinan siswa melalui pendekatan pembelajaran yang tepat.

Contoh konkret dari tantangan ini adalah ketika seorang guru tidak memahami bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya, dalam mengajarkan konsep gotong royong, seorang guru yang kurang familiar dengan prinsip-prinsip Pancasila mungkin hanya memberikan penjelasan teoritis tanpa memberikan contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata siswa. Akibatnya, siswa mungkin tidak melihat hubungan langsung antara nilai-nilai Pancasila dan praktik kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam menghadapi tantangan ini, upaya yang lebih serius dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru terkait Kurikulum Merdeka dan pembelajaran Pendidikan Pancasila sangatlah penting. Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta kerja sama antar-guru dan antar-lembaga pendidikan, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini. Selain itu, dukungan yang lebih besar dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga sangat penting dalam menyediakan sumber daya yang memadai dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

Menyoroti pentingnya pembangunan kepemimpinan siswa sebagai bagian penting dari pembentukan karakter yang holistik. Mereka menekankan bahwa pengembangan kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memimpin, tetapi juga tentang memberi mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Salah satu contoh strategi yang dapat diterapkan adalah melalui pembelajaran berbasis proyek, di mana

siswa diberi tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan dukungan dari guru.

Dengan demikian, memunculkan jiwa kepemimpinan pada anak-anak SD bukan hanya masalah sekadar menambahkan kegiatan ekstrakurikuler atau proyek berbasis sekolah, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran kepemimpinan ke dalam kurikulum yang ada. Hal ini menekankan perlunya perbaikan sistemik dalam pelatihan guru dan pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya.

SIMPULAN

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi institusi pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Hal ini memungkinkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, yang menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kepemimpinan siswa. Namun, kendala dalam implementasi, terutama dalam hal pemahaman dan kesiapan guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, mempertanyakan efektivitasnya.

Kurangnya pemahaman dan kesiapan guru dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Misalnya, kurangnya konteks praktis dalam menjelaskan konsep-konsep Pancasila dapat mengakibatkan pemahaman siswa yang kurang mendalam. Selain itu, tantangan kekurangan pelatihan dan dukungan bagi guru menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan kepemimpinan siswa. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pelatihan guru yang terstruktur dan berkelanjutan serta dukungan lintas-lembaga pendidikan menjadi krusial. Lebih dari itu, pentingnya memasukkan pembangunan kepemimpinan siswa sebagai bagian integral dari kurikulum menyoroti perlunya perbaikan sistemik dalam pendidikan. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang memadai dan pemberian kesempatan yang setara bagi setiap siswa untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, B., et al. (2020). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembentukan Karakter Siswa di SD Negeri 01. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 123-135.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
- Smith, J. (2021). *Transformasi Kurikulum: Menuju Pendidikan yang Relevan dan Bermakna*. Penerbit Andalan.
- Subekti, A., Sudirman, S., & M. Fatah, M. (2020). Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio Dei*, 4(1), 12-24.
- Suyanto, T. (2019). Pembelajaran Kontekstual dalam Meningkatkan Kepemimpinan Siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 219-231.
- Yuniarto, B., Maryanto, M., & Habibi, A. (2022). Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal sosial dan sains*, 2(11), 1170-1178.